Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science
Vol. 4, No. 04, Oktober 2026, pp. 709~723

Analisis Pengaruh Inflasi dan Upah Minimum Terhadap jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi

Fefriza Muharamah[1], Trie Hierdawati[2], ABD Halim[3]
[1-3] Universitas Muhammadiyah Jambi

Info Artikel

Article history:

Received Oct, 2026
Revised Oct, 2026
Accepted Oct, 2026

Kata Kunci:

Inflasi, Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin, Kemiskinan, Provinsi Jambi

Keywords:

Inflation, Minimum Wage, Number of Poor People, Poverty, Jambi Province

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang masih dihadapi Provinsi Jambi dan dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi, termasuk perubahan inflasi dan upah minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi selama periode 2016–2025, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. Sampel penelitian terdiri atas 10 observasi tahunan selama periode 2016–2025 yang ditentukan berdasarkan ketersediaan data penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan pengujian asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin, tetapi tidak signifikan pada taraf 5%, sedangkan upah minimum memiliki pengaruh negatif tetapi juga tidak signifikan pada taraf 5%. Secara simultan, inflasi dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian kedua variabel tersebut terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi menggunakan data periode 2016–2025. Hasil penelitian mengimplikasikan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara multidimensional dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial lainnya.

ABSTRACT

The Poverty is one of the development problems that continues to be faced by Jambi Province and is influenced by various economic conditions, including changes in inflation and the minimum wage. This study aims to analyze the effect of inflation and the minimum wage on the number of poor people in Jambi Province during the 2016–2025 period, both partially and simultaneously. This study uses a quantitative approach with annual secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Jambi Province. The research sample consists of 10 annual observations during the 2016–2025 period, determined based on the availability of research data. Data analysis was conducted using multiple linear regression with classical assumption tests, t-test, F-test, and coefficient of determination. The results show that inflation has a positive effect on the number of poor people, but the effect is not statistically significant at the 5% significance level, while the minimum wage has a negative effect but is also not statistically significant at the 5% significance level. Simultaneously, inflation and the minimum wage do not have a significant effect on the number of poor people. The novelty of this study lies in examining the two variables on the number of poor people

in Jambi Province using data for the 2016–2025 period. The findings imply that poverty alleviation policies need to be implemented multidimensionally by considering other economic and social factors..

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Fefriza Muharamah
Institution: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Jambi
Email: fzamuharamah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum, baik pangan maupun nonpangan, yang diukur berdasarkan garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik menetapkan garis kemiskinan dari kebutuhan energi minimum 2.100 kilokalori per kapita per hari ditambah kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan (Badan Pusat Statistik, 2023). Inflasi, yaitu kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, berpotensi menggerus daya beli riil masyarakat berpendapatan rendah sehingga memperbesar peluang jatuh ke bawah garis kemiskinan (Sudirman & Andriani, 2017). Upah minimum, di sisi lain, adalah instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang ditetapkan pemerintah dengan tujuan menjamin kebutuhan hidup layak pekerja sekaligus menjadi salah satu jalur pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah (Todaro & Smith, 2015). Ketiga konsep ini kemiskinan, inflasi, dan upah minimum saling berkaitan dalam kerangka ekonomi makro pembangunan daerah dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan kesejahteraan di Indonesia.

Masalah penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi masih menjadi persoalan pembangunan yang belum sepenuhnya teratasi, meskipun perekonomian daerah tersebut terus tumbuh dan Upah Minimum Provinsi mengalami kenaikan hampir setiap tahun. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi bahkan sempat melonjak signifikan pascapandemi, namun perbaikan indikator makroekonomi tersebut tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan secara proporsional (Pauzan dkk., 2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana fluktuasi inflasi dan kebijakan upah minimum benar-benar berperan dalam menekan angka kemiskinan di provinsi tersebut, sehingga persoalan ini penting untuk dikaji secara empiris.

Sejauh ini, pemerintah telah berupaya mengatasi persoalan kemiskinan melalui kebijakan penetapan upah minimum berbasis Kebutuhan Hidup Layak serta pengendalian inflasi melalui koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kajian-kajian terdahulu pada berbagai provinsi menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum umumnya berhubungan negatif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan, sebagaimana ditemukan pada kasus Jawa Tengah maupun Jambi sendiri (Sudirman & Andriani, 2017). Namun demikian, solusi tersebut memiliki keterbatasan: pengaruh inflasi terhadap kemiskinan pada beberapa studi justru ditemukan tidak signifikan atau

bahkan berlawanan arah dengan teori, dan hasil antarstudi cenderung tidak konsisten karena perbedaan rentang waktu, wilayah kajian, serta jumlah observasi yang digunakan (Sudirman & Andriani, 2017; Hastin & Siswadhi, 2021). Ketidakkonsistenan inilah yang menjadi alasan utama pentingnya dilakukan penelitian kembali secara khusus untuk Provinsi Jambi dengan data yang lebih mutakhir.

Gap yang hendak diisi oleh penelitian ini adalah masih terbatasnya kajian yang secara khusus menguji kembali pengaruh inflasi dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi dengan periode data terbaru serta pengujian asumsi klasik yang lengkap, mengingat mayoritas studi terdahulu di provinsi ini menggunakan rentang waktu yang relatif lama dan belum mencakup perkembangan terkini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan upah minimum jumlah Penduduk miskin di Provinsi Jambi melalui pendekatan regresi linear berganda disertai pengujian asumsi klasik secara menyeluruh, sehingga diperoleh simpulan yang lebih valid mengenai peran kedua variabel tersebut dalam menjelaskan variasi jumlah penduduk miskin di daerah ini.

Untuk memperkuat dasar teoretis dan empiris penelitian ini, bagian berikut menelaah perkembangan literatur mengenai hubungan inflasi, upah minimum, dan kemiskinan, dimulai dari kajian rintisan yang secara khusus membahas topik ini di Provinsi Jambi, dilanjutkan dengan perkembangan penelitian sejenis hingga karya-karya terkini, serta pencapaian dan keterbatasannya.

Kajian rintisan yang menjadi acuan utama topik ini adalah penelitian Sudirman dan Andriani (2017) yang secara eksplisit menganalisis pengaruh upah minimum dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi periode 2001-2015 menggunakan regresi linear berganda atas data deret waktu. Penelitian tersebut menemukan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan. Temuan ini menjadi rujukan penting karena mengangkat kombinasi variabel dan lokasi kajian yang identik dengan penelitian ini, sekaligus menjadi titik tolak bagi penelitian penelitian lanjutan di Provinsi Jambi maupun provinsi lain di Indonesia.

Sejak kajian tersebut, penelitian mengenai determinan kemiskinan di Provinsi Jambi terus berkembang dengan memperluas variabel dan cakupan waktu. Hastin dan Siswadhi (2021) memperluas model dengan menambahkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengangguran selain inflasi sebagai determinan kemiskinan di Provinsi Jambi. Sabyan dan Widyanti (2022) memfokuskan kajian pada Kota Jambi dengan menelaah pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional terhadap kemiskinan. Adapun Pauzan dkk. (2025) memperbarui kajian dengan menambahkan variabel jumlah penduduk serta menggunakan data hingga tahun-tahun terakhir, mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menangkap dinamika kemiskinan Provinsi Jambi yang terus berubah. Sejalan dengan perkembangan penelitian tersebut, Hierdawati dkk. (2025) menganalisis pengaruh upah minimum provinsi, pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi periode 2010–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan secara simultan seluruh variabel yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Selain itu, menurut Halim dkk. (2022), penambahan jumlah penduduk sebagai variabel independen bersama pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada periode 2011–2020 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Sementara itu, menurut Halim dkk. (2025), pengujian

pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi periode 2010–2023 mendapatkan hasil yang berbeda, yaitu pengaruh simultan yang signifikan antara kedua variabel tersebut, meskipun secara parsial inflasi tetap tidak berpengaruh signifikan. Adapun menurut Sari dkk. (2022), tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tebo periode 2008–2021. Variasi hasil antarstudi ini menegaskan bahwa pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di wilayah Jambi masih belum konsisten dan bergantung pada periode data serta kombinasi variabel yang digunakan.

Di luar Provinsi Jambi, karya-karya terkini juga menegaskan pola serupa. Hutabarat dkk. (2023) yang mengkaji pengaruh upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia, dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2021 turut mengonfirmasi peran penting upah minimum dalam menekan kemiskinan. Secara umum, karya-karya terkini tersebut telah berhasil menunjukkan konsistensi arah pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan pada berbagai wilayah, memperkaya model dengan variabel kontrol tambahan, serta menggunakan pengujian asumsi klasik untuk memastikan keandalan model regresi. Meskipun demikian, karya-karya tersebut umumnya masih memiliki keterbatasan berupa periode data yang belum mutakhir, jumlah observasi yang relatif sedikit pada data deret waktu tingkat provinsi, serta hasil pengaruh inflasi yang cenderung tidak konsisten dan sering tidak signifikan, sehingga peran inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi khususnya masih memerlukan pengujian ulang dengan data terbaru.

Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan memperbarui periode data kemiskinan, inflasi, dan upah minimum Provinsi Jambi, serta menerapkan rangkaian pengujian asumsi klasik secara lengkap, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, sebelum melakukan interpretasi hasil regresi linear berganda. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris terbaru dan pengujian metodologis yang lebih ketat mengenai peran inflasi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi, yang dapat melengkapi dan memperbarui temuan kajian-kajian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menguji dua hipotesis utama, yaitu: H1: Inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi, dan H2: Upah minimum berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Hasil utama yang diharapkan adalah diperolehnya gambaran empiris mengenai arah dan kekuatan pengaruh kedua variabel tersebut, sekaligus konfirmasi apakah pola hubungan yang ditemukan pada kajian-kajian terdahulu masih berlaku pada periode data yang lebih baru.

Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, baik melalui penyesuaian kebijakan upah minimum maupun pengendalian inflasi daerah, serta memperkaya literatur ekonomi pembangunan mengenai determinan kemiskinan di tingkat provinsi di Indonesia. Selanjutnya, artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian kedua menguraikan metode penelitian, mencakup jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis regresi linear berganda beserta pengujian asumsi klasik yang digunakan. Bagian ketiga menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, meliputi analisis deskriptif data, hasil pengujian asumsi klasik, hasil regresi, serta interpretasi pengaruh inflasi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Bagian keempat memuat simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan fundamental yang masih dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini menjadi hambatan serius dalam proses pembangunan ekonomi karena masyarakat yang berada dalam kategori miskin cenderung tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang layak (Kevin Brael Agustian & Aprillia Nilasari, 2025). Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta akses terhadap sumber daya ekonomi (Pauzan dkk., 2025).

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai tingkat kesejahteraan yang layak. Menurut Ragnar Nurkse (1961) melalui teori Vicious Circle of Poverty, kemiskinan merupakan suatu lingkaran yang saling berkaitan. Pendapatan yang rendah menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk menabung dan berinvestasi. Rendahnya investasi mengakibatkan produktivitas tenaga kerja tetap rendah sehingga pendapatan yang diperoleh masyarakat tidak mengalami peningkatan. Kondisi tersebut terus berulang dan menyebabkan kemiskinan sulit diputus tanpa adanya intervensi pembangunan ekonomi. Hasil penelitian Alhudhori (2017) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh beberapa indikator ekonomi, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran. Selain itu, Rohmah, Suratno, dan Kuswanto (2021) menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan serta perluasan kesempatan kerja berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

2.2 Inflasi

Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum serta berlangsung secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Menurut Sukirno (2016), inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang secara umum yang berlangsung terus-menerus sehingga mengurangi kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa. Selain menurunkan daya beli masyarakat, tingkat inflasi yang tinggi juga dapat memengaruhi kondisi perekonomian karena berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Lebih lanjut, inflasi yang tidak terkendali dapat memicu ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Secara teori, kenaikan inflasi menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat lebih cepat dibandingkan kenaikan pendapatan masyarakat. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi menurun, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian Fadhillah, Arintoko, dan Kamio (2021) menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Kenaikan inflasi berpotensi menurunkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemiskinan, meskipun dalam penelitian tersebut pengaruh inflasi tidak signifikan

secara statistik. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Murjani (2019) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, stabilitas inflasi menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurut Halim dkk. (2022, 2025), pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi secara konsisten tidak signifikan secara statistik, walaupun arah pengaruhnya bervariasi antarperiode data.

2.3 Upah Minimum

Upah minimum merupakan penerimaan bulanan terendah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Besaran upah minimum ditetapkan pemerintah sebagai bentuk perlindungan bagi tenaga kerja agar memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Menurut Sukirno (2016), peningkatan upah akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan hidup juga meningkat. Kebijakan upah minimum juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui pemberian upah yang layak.

Dalam perspektif ekonomi tenaga kerja, kebijakan upah minimum diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi risiko kemiskinan, meskipun dampaknya dapat berbeda bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja dan kemampuan perusahaan. Oleh karena itu, perubahan upah minimum diduga dapat memengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian diarahkan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Sementara itu, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan masing-masing variabel selama periode penelitian, sedangkan penelitian asosiatif dimaksudkan untuk menguji hubungan serta pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jambi yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya dinamika perkembangan inflasi, upah minimum provinsi, dan tingkat kemiskinan yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun sehingga dinilai relevan untuk dianalisis.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk data runtun waktu (time series) tahunan selama periode 2016–2025. Data diperoleh melalui metode dokumentasi dengan mengumpulkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang berkaitan dengan variabel penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan diolah sesuai dengan kebutuhan analisis.

Populasi penelitian mencakup seluruh data inflasi, upah minimum provinsi, dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan ketersediaan data yang lengkap selama periode penelitian sehingga diperoleh sebanyak 10 observasi tahunan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi yang diukur dalam satuan ribu jiwa. Variabel independen terdiri atas inflasi yang diukur dalam satuan persentase (%) dan upah minimum provinsi yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

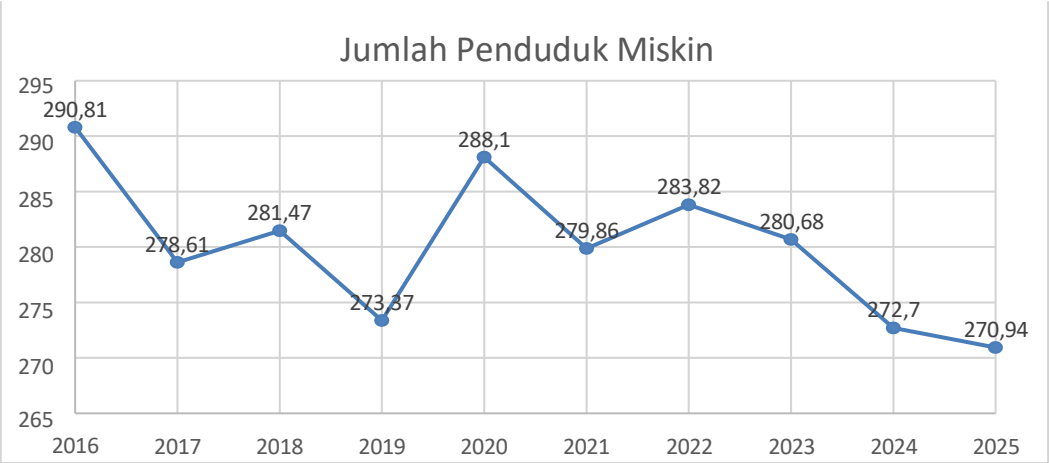
Keterangan:
Y = jumlah Penduduk Miskin
X_1 = Inflasi
X_2 = Upah minimum provinsi
β_0 = Konstanta
β_1, β_2 = Koefisien regresi
ε = Galat (error term)

Sebelum dilakukan analisis regresi, model terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson. Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi-asumsi statistik sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat dipercaya. Selanjutnya, dilakukan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, serta uji F untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi



Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi
Sumber: BPS Provinsi Jambi Data diolah (2026)

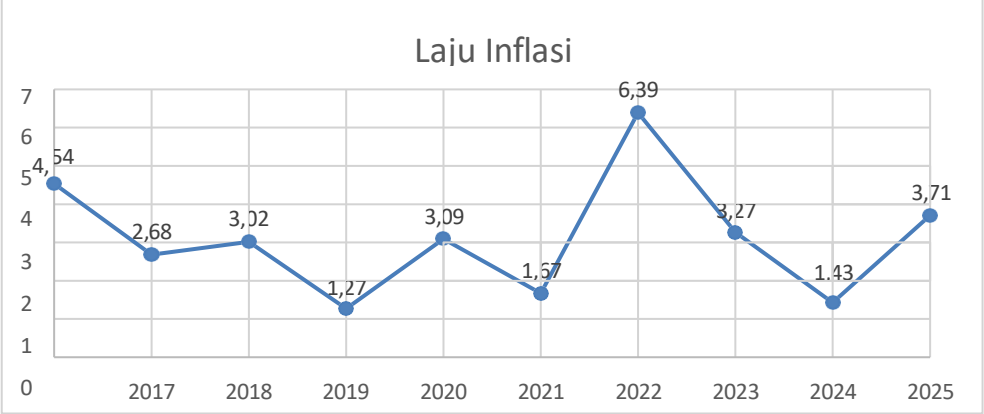
Berdasarkan Gambar 1, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi selama periode 2016 2025 menunjukkan kecenderungan menurun meskipun masih mengalami fluktuasi pada beberapa tahun pengamatan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 290,81 ribu jiwa,

kemudian menurun menjadi 278,61 ribu jiwa pada tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 281,47 ribu jiwa, namun kembali menurun menjadi 273,37 ribu jiwa pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 288,10 ribu jiwa. Peningkatan tersebut diduga berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, menurunnya pendapatan masyarakat, serta meningkatnya risiko kehilangan pekerjaan. Setelah kondisi ekonomi mulai membaik, jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 279,86 ribu jiwa pada tahun 2021. Meskipun sempat meningkat menjadi 283,82 ribu jiwa pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 280,68 ribu jiwa pada tahun 2023, kemudian mencapai 272,70 ribu jiwa pada tahun 2024 dan 270,94 ribu jiwa pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar 19,87 ribu jiwa selama periode penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan telah memberikan hasil yang cukup baik, meskipun penurunannya belum berlangsung secara konsisten karena masih dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi.

4.1.2 Perkembangan Inflasi



Gambar 2. Laju Inflasi

Sumber: BPS Provinsi Jambi Data diolah (2026)

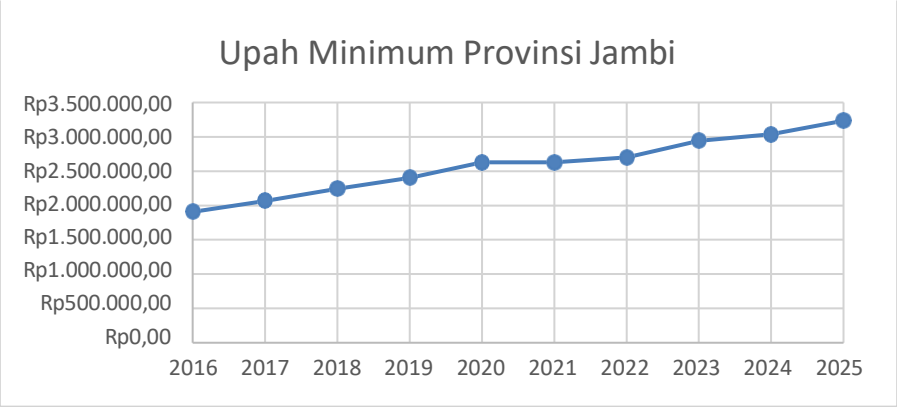
Berdasarkan Gambar 2, tingkat inflasi di Provinsi Jambi selama periode 2016–2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Inflasi tercatat sebesar 4,54% pada tahun 2016, kemudian menurun menjadi 2,68% pada tahun 2017 dan meningkat sedikit menjadi 3,02% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 inflasi kembali menurun hingga mencapai 1,27%, yang merupakan tingkat inflasi terendah selama periode penelitian.

Pada tahun 2020 inflasi meningkat menjadi 3,09%, kemudian kembali menurun menjadi 1,67% pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi lonjakan inflasi hingga 6,39%, yang merupakan tingkat inflasi tertinggi selama periode penelitian. Peningkatan tersebut diduga dipengaruhi oleh kenaikan harga energi dan bahan pangan serta proses pemulihan ekonomi pascapandemi. Setelah itu, inflasi kembali menurun menjadi 3,27% pada tahun 2023 dan 1,43% pada tahun 2024, sebelum meningkat kembali menjadi 3,71% pada tahun 2025.

Secara umum, perkembangan inflasi di Provinsi Jambi menunjukkan kondisi yang relatif terkendali meskipun mengalami fluktuasi. Perubahan tingkat inflasi tersebut mencerminkan adanya

dinamika kondisi perekonomian yang dipengaruhi oleh faktor permintaan, penawaran, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.

4.1.3 Perkembangan Upah Minimum



Gambar 3. Upah Minimum Provinsi Jambi

Sumber: BPS Provinsi Jambi Data diolah (2026)

Berdasarkan Gambar 3, upah minimum Provinsi Jambi selama periode 2016–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2016 upah minimum ditetapkan sebesar Rp1.906.650, kemudian meningkat menjadi Rp2.063.948 pada tahun 2017 dan Rp2.243.718 pada tahun 2018. Kenaikan tersebut berlanjut menjadi Rp2.400.000 pada tahun 2019 dan Rp2.630.162 pada tahun 2020.

Pada tahun 2021 tidak terjadi kenaikan upah minimum sehingga nilainya tetap sebesar Rp2.630.162. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas dunia usaha selama masa pandemi COVID-19. Setelah itu, upah minimum kembali mengalami peningkatan menjadi Rp2.698.940 pada tahun 2022, Rp2.943.033 pada tahun 2023, Rp3.037.122 pada tahun 2024, dan mencapai Rp3.234.535 pada tahun 2025.

Selama periode penelitian, upah minimum Provinsi Jambi mengalami peningkatan sekitar 69,64% dibandingkan tahun 2016. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan pengupahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun demikian, efektivitas kenaikan upah minimum dalam menurunkan kemiskinan tetap bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi ketentuan pengupahan.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Shapiro-Wilk Statistic	Sig.	Keterangan
Unstandardized Residual	0,929	0,440	Berdistribusi normal

Sumber: SPSS Data diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,440. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam

model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Inflasi	0,996	1,004	Tidak terjadi multikolinearitas
Upah Minimum	0,996	1,004	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: SPSS Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel inflasi memiliki nilai tolerance sebesar 0,996 dan VIF sebesar 1,004, sedangkan variabel upah minimum memiliki nilai tolerance sebesar 0,996 dan VIF sebesar 1,004. Nilai tolerance kedua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Variabel	Sig.	Keterangan
Inflasi	0,916	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Upah Minimum	0,944	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: SPSS Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser, variabel inflasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,916, sedangkan variabel upah minimum memiliki nilai signifikansi sebesar 0,944. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Variabel	Sig.	Keterangan
1	2,093	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: SPSS Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson, diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,093. Dengan jumlah observasi sebanyak 10 dan dua variabel independen, nilai tersebut berada di antara batas atas (dU) sebesar 1,641 dan 4-dU sebesar 2,359. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi.

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

4.3.1 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (t)

Variabel	Koefisien B	t	Sig.
Konstanta	294,301	27,340	0,000
Inflasi	2,058	1,937	0,094
Upah Minimum	-0,000008011	-2,083	0,076

Sumber: SPSS Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel inflasi memiliki koefisien regresi sebesar 2,058 dengan nilai signifikansi sebesar 0,094. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga inflasi belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan inflasi cenderung diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk miskin, meskipun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi ditolak pada taraf signifikansi 5%, meskipun arah koefisien mendukung arah hipotesis yang diajukan.

Variabel upah minimum memiliki koefisien regresi sebesar -0,000008011 dengan nilai signifikansi sebesar 0,076. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga upah minimum juga belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum cenderung diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi hubungan tersebut belum terbukti signifikan secara statistik pada taraf 5%. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Hierdawati dkk. (2025) yang menemukan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Perbedaan hasil tersebut dapat berkaitan dengan perbedaan periode pengamatan dan variabel yang digunakan dalam model penelitian. Penelitian Hierdawati dkk. menggunakan periode 2010–2023 dengan memasukkan pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2016–2025 dengan inflasi dan upah minimum sebagai variabel independen.Dengan demikian, H2 yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi juga ditolak pada taraf signifikansi 5%, meskipun arah koefisien sesuai dengan arah yang dihipotesiskan.

4.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (F)

Model	F	Sig.	Keterangan
Regresi	4,319	0,060	Tidak signifikan

Sumber: SPSS Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil pengujian simultan, diperoleh nilai F sebesar 4,319 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,060. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga model penelitian belum menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara simultan antara inflasi dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi selama periode 2016–2025. Dengan demikian, inflasi dan upah minimum secara bersama-sama belum dapat dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada taraf signifikansi 5%.

4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
0,743	0,552	0,424

Sumber: SPSS Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,552. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel inflasi dan upah minimum secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi jumlah penduduk miskin sebesar 55,2%. Sementara itu, sebesar 44,8%

variasi jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,424 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan observasi dalam model, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi jumlah penduduk miskin sebesar 42,4%.

4.3.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien B	t	Sig.
Konstanta	294,301	27,340	0,000
Inflasi	2,058	1,937	0,094
Upah Minimum	-0,000008011	-2,083	0,076

Sumber: SPSS Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, model penelitian menghasilkan persamaan $Y = 294{,}301 + 2{,}058X_1 - 0{,}000008011X_2 + e$. Nilai konstanta sebesar 294,301 menunjukkan bahwa ketika inflasi dan upah minimum dianggap konstan, jumlah penduduk miskin diperkirakan sebesar 294,301. Koefisien regresi inflasi sebesar 2,058 menunjukkan adanya hubungan positif antara inflasi dan jumlah penduduk miskin. Artinya, peningkatan inflasi cenderung diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk miskin. Sementara itu, koefisien regresi upah minimum sebesar -0,000008011 menunjukkan adanya hubungan negatif antara upah minimum dan jumlah penduduk miskin. Artinya, peningkatan upah minimum cenderung diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa inflasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,094. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (0,094 > 0,05), sehingga inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Meskipun koefisien regresi bernilai positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan inflasi cenderung diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk miskin, hubungan tersebut tidak terbukti signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%.

Pada variabel upah minimum, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,076. Nilai tersebut juga lebih besar dari 0,05 (0,076 > 0,05), sehingga upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Meskipun demikian, koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum cenderung diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, arah hubungan yang diperoleh sesuai dengan dugaan teoritis, tetapi pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik pada tingkat signifikansi 5%.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh inflasi dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi periode 2016–2025 melalui regresi linear berganda beserta pengujian asumsi klasik secara lengkap. Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif (koefisien 2,058) dan upah minimum berpengaruh negatif (koefisien -0,000008011) terhadap jumlah penduduk miskin, sesuai dengan arah teoretis yang diharapkan. Namun, secara statistik kedua variabel tersebut belum signifikan pada taraf 5% (inflasi: sig=0,094; upah minimum: sig=0,076), meskipun signifikan pada taraf 10%. Pengujian simultan (uji F) juga menunjukkan hasil

yang belum signifikan pada taraf 5% (F=4,319; sig=0,060), sehingga secara bersama-sama kedua variabel tersebut belum sepenuhnya terbukti berpengaruh terhadap kemiskinan pada tingkat signifikansi yang ketat. Model penelitian mampu menjelaskan 55,2% variasi jumlah penduduk miskin (R^2=0,552), dengan Adjusted R^2 sebesar 0,424, yang mengindikasikan bahwa sebagian variasi kemiskinan masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model.

Hasil ini konsisten dengan arah temuan penelitian terdahulu di Provinsi Jambi (Sudirman & Andriani, 2017), yang juga menemukan upah minimum berpengaruh negatif dan inflasi berpengaruh positif meski tidak signifikan. Konsistensi arah pengaruh ini memperkuat dugaan bahwa hubungan antara inflasi, upah minimum, dan kemiskinan di Provinsi Jambi memang bersifat lemah namun searah dengan teori.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam interpretasi hasil. Pertama, jumlah observasi yang digunakan relatif kecil (n=10, data tahunan 2016–2025), sehingga kekuatan statistik (power) pengujian menjadi terbatas dan berpotensi menyebabkan hubungan yang secara riil ada namun tidak terdeteksi signifikan pada taraf 5%. Kedua, selisih antara R^2 dan Adjusted R^2 yang cukup besar mengindikasikan model masih rentan terhadap ketidakstabilan akibat jumlah observasi yang terbatas. Ketiga, model hanya melibatkan dua variabel independen, sehingga faktor lain yang berpotensi memengaruhi kemiskinan, seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia, belum tercakup dalam penelitian ini.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan memperpanjang periode data atau menggunakan data bulanan/triwulanan untuk memperbesar jumlah observasi, serta menambahkan variabel kontrol lain agar model lebih komprehensif dalam menjelaskan determinan kemiskinan di Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, K. B., & Nilasari, A. (2025). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2016–2023. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, 2(4), 7–24. https://doi.org/10.62017/jimea

Alhudori, M. (2017). Pengaruh IPM, PDRB dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 1(1), 113–125. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.12

Badan Pusat Statistik. (2023). Metadata indikator: Garis kemiskinan. Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA). https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/112481

Fadhillah, A., Arintoko, & Kamio. (2021). Effect of exports, government expenditure and inflation on Indonesia poverty (2000–2019). Media Ekonomi, 21(1), 43–51.

Halim, A., Mayesti, I., & Anggraini, R. (2022). Analisis pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. J-MAS: Jurnal Manajemen dan Sains, 7(2), 1311–1315. https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.593

Halim, A., Mayesti, I., Mukti, & Rosita, R. (2025). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 9(1), 563–566. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2442

Hastin, M., & Siswadhi, F. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Jurnal Ekonomi Sakti (JES), 10(1), 1–22. https://doi.org/10.36272/jes.v10i2.216

Hutabarat, T. A. S., Fathorrazi, M., & Nasir, M. A. (2023). Pengaruh upah minimum, indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010–2021. Journal Ekuilibrium, 7(1), 1–12. https://doi.org/10.19184/jek.v7i1.35051

Murjani, A. (2019). Short-run and long-run impact of inflation, unemployment, and economic growth towards poverty in Indonesia: ARDL approach. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2(1), 15–29.

Nurkse, R. (1961). Problems of capital formation in underdeveloped countries. Oxford University Press.

Pauzan, P., Rahayu, Y., & Fahmi, A. (2025). Analisis pengaruh upah minimum dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Jurnal Development, 13(2), 253–268.

Hierdawati, T., Agustini, S., Affriza, M., & Wiarta, I. (2025). Pengaruh upah minimum provinsi, pengangguran, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi. BISNISIA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1(1), 21–28.

Rohmah, C., Suratno, & Kuswanto. (2021). The effect of education and unemployment on poverty in Jambi Province. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19(1), 31–43.

Sabyan, M., & Widyanti, R. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional terhadap kemiskinan di Kota Jambi. Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, 8(3), 311–315. https://doi.org/10.31869/me.v8i3.3813

Sari, Y., Halim, A., Mustika, Winarni, E., & Pratiwi, D. (2022). Analisis pengaruh tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tebo. Jurnal Development, 10(2), 49–63.

Sudirman, S., & Andriani, L. (2017). Pengaruh upah minimum dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 1(1), 148–156. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.15

Sukirno, S. (2016). Makroekonomi: Teori pengantar. PT RajaGrafindo Persada.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Pearson.